

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pariwisata akan terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan manusia di dunia. Hal tersebut sesuai dengan konsep yang telah ada, seperti wisata pedesaan (*village tourism*) dan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Desa wisata menjadi sebuah alternatif untuk melakukan pembangunan desa-desa yang mengutamakan pembangunan berkelanjutan serta mengedepankan masyarakat setempat sebagai peran dari pariwisata yang ada (Fatahillah, 2021). Berbagai komponen yang dimiliki oleh suatu desa seperti cara hidup masyarakat, budaya kegiatan desa, potensi alam, pariwisata sejarah, serta keindahan desa menjadi peluang untuk pengembangan desa wisata di Indonesia.

Desa wisata adalah salah satu konsep tren terkini dalam dunia pariwisata dan menjadi daya tarik wisata saat ini (Supriyadi & Nihayati, 2023). Hal ini sesuai dengan prinsip utama desa wisata yaitu, untuk meningkatkan desa dalam rangka menghasilkan pendapatan dari wisata. Pembangunan desa wisata saat ini sangat melesat dan sedang dalam tahap terus berkembang yang dilakukan berdasarkan program pemerintah untuk dapat meningkatkan taraf devisa negara. Di mana langkah strategis yang dilakukan melalui implementasi kegiatan 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas) dengan wujud nyata mengedepankan pengembangan atraksi wisata, meningkatkan kualitas amenitas, memperkuat promosi wisata, dan menyusun standar prosedur manajemen pariwisata (Yusra & Fajri, 2023).

Sesuai dengan program pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengembangan desa wisata di Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan desa yang berpotensi sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penggalan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Karena, berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desa memiliki hak asal usul dan hak adat istiadat untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaannya (Wirdayanti et al., 2021).

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki keanekaragaman objek wisata dari berbagai aspek dengan kuantitas yang tinggi. Tipe objek wisata tertinggi di Jawa Barat paling banyak terdapat pada objek wisata alam yang memiliki jumlah mencapai 53,71%. Hal ini menjadi sebuah potensi besar pengembangan desa wisata di Jawa Barat. Namun, tidak semua daerah di Jawa Barat memiliki pengembangan desa wisata secara merata. Kabupaten Bandung termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi dalam pengembangan desa wisata. Tetapi, berdasarkan Data Potensi Daerah Pengembangan Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 berdasarkan Jumlah Objek Wisata dan Ketersediaan Usaha Angkutan, Kabupaten Bandung menempati posisi kelima setelah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Garut dengan Jumlah Objek Wisata sebanyak 886 dan Jumlah Angkutan Usaha Angkutan Wisata sebanyak 24. Selain itu, desa wisata di Kabupaten Bandung masih banyak yang berstatus sebagai Desa Wisata Rintisan.

**Gambar 1.1**

**Klasifikasi Persebaran Desa Wisata di Kabupaten Bandung**



Sumber: Surat Keputusan Bupati Bandung (2022 & 2023)

Terlihat dari gambar diatas jumlah Desa Wisata di Wilayah Kabupaten Bandung secara keseluruhan adalah 100 Desa Wisata. Jumlah paling banyak Desa Wisata yang berstatus rintisan yaitu 87 desa dan jumlah paling sedikit yaitu Desa Wisata yang berstatus maju sebanyak 2 desa. Perbandingan jumlah Desa Wisata di Wilayah Kabupaten Bandung tersebut berpengaruh pada pengembangan desa wisata berkelanjutan (*sustainable tourism village*).

**Tabel 1.1**  
**Potensi Desa Wisata Alamendah**

<b>Potensi Desa Alamendah</b>
<i>Homestay</i>
Agrowisata
UMKM (Olahan Makanan)
Peternakan
Kesenian
Perkebunan Kopi
<i>Birds Watching</i>
Wisata Olahraga Trekking
<i>Virtual Tour</i>

Sumber: Surat Keputusan Bupati Bandung tentang Penetapan Desa Wisata di  
Wilayah Kabupaten Bandung (2022)

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 556.42/kep.71-Dispopar/2011 pada tanggal 2 Februari 2011, Desa Alamendah ditetapkan sebagai Desa Wisata dengan berbagai potensi yang telah tercantum pada tabel diatas. Potensi-potensi tersebut menjadikan Alamendah sebagai Desa Wisata sampai saat ini dengan status Desa Wisata Maju.

Desa wisata termasuk ke dalam salah satu konsep pengembangan industri pariwisata pada suatu daerah. Keberadaan sebuah desa wisata tidak diragukan lagi dapat mendukung pariwisata jika desa tersebut memiliki keaslian yang dapat dilihat dari karakteristik kehidupan sehari-hari, adat istiadat, sosial budaya, arsitektur tradisional, dan tata ruang desa. Salah satu contoh penerapan pembangunan berkelanjutan adalah desa wisata yang kini menjadi agenda global. Pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan dengan pengembangan desa wisata berkelanjutan yang dihubungkan dengan digitalisasi yaitu, dapat mengimplementasikan promosi melalui media sosial, informasi terkait wisata yang tersedia pada *online platform*, paket wisata secara *online*, dan layanan *e-ticketing*.



**Gambar 1.2**

### **SDGs Desa (Pembangunan Berkelanjutan)**

Pengembangan desa wisata berkelanjutan (*sustainable tourism village*) memiliki keterkaitan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Terdapat 4 prinsip pengembangan *sustainable tourism* diantaranya yaitu, *Economically Feasible*, *Environmentally Feasible*, *Socially Acceptable*, dan *Technologically Appropriate*. Salah satu prinsip yang menjadi pengaruh besar bagi pengembangan desa wisata berkelanjutan yaitu adanya *Technologically Appropriate* yang berhubungan langsung dengan digitalisasi. Teknologi dan internet menjadi sebuah urgensi bagi penduduk desa supaya tidak adanya ketertinggalan informasi dan perkembangan global. Selain itu, prinsip pembangunan desa wisata berkelanjutan sudah harus mengedepankan dan mengimplementasikan teknologi digitalisasi yang bertujuan supaya efisien, luas, dan berorientasi jangka panjang (Wirdayanti et al., 2021).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan strategi dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dengan memanfaatkan digitalisasi yaitu, melakukan berbagai persiapan supaya penerapan *digital tourism* di Indonesia dapat terimplementasikan secara optimal. Upaya tersebut yaitu penerapan layanan internet dan wifi. Pihak Kemanparekraf/Baparekraf melakukan jalinan kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dan informatika (TIK) untuk pengembangan desa wisata di Indonesia. Upaya tersebut tidak terfokus pada *digital tourism* saja. Tetapi, untuk

meningkatkan layanan internet dengan memaksimalkan perkembangan tren wisata digital di Indonesia.

Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemenparekraf/Baparekraf untuk pengembangan desa wisata berbasis digital. Tetapi, berdasarkan data tahun 2023 di Kabupaten Bandung terdapat sekitar 11 desa yang masih berstatus “*blank spot*” atau tidak terakses jaringan seluler. Dari jumlah tersebut terdapat 6 desa yang bestatus sebagai Desa Wisata. Hal ini menjadi sebuah kesenjangan antara upaya yang dilakukan oleh Kemenparekraf/Baparekraf dengan kondisi nyata akses internet di Kabupaten Bandung yang berdampak terhadap pemanfaatan digitalisasi di Desa Wisata Kabupaten Bandung.

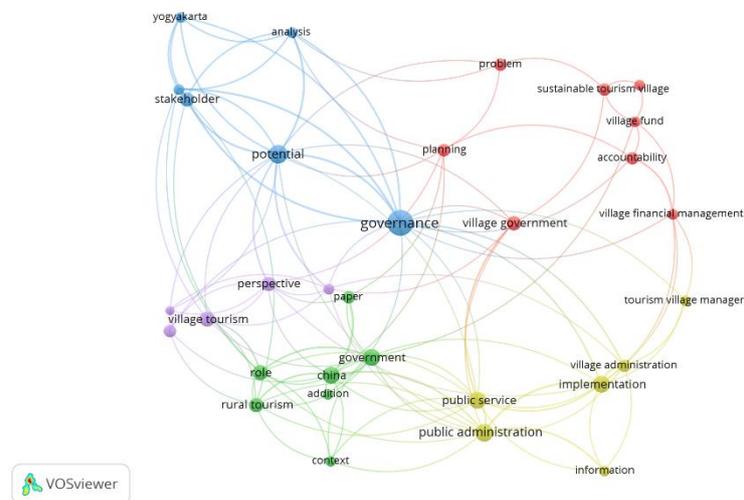
**Tabel 1.2**  
**Sebaran *Blank Spot* di Desa Wisata Kabupaten Bandung**

No	Lokasi	Status	Potensi
1.	Desa Cilame	Rintisan	Wisata lapang adu domba, spot <i>selfie</i> , bumi perkemahan andes, puncak batu pangukusan.
2.	Desa Baros	Berkembang	Sungai Citalutug, pencak silat, pagelaran adu domba, pawai alegoris, sisingaan, kuda renggong.
3.	Desa Cipelah	Rintisan	Pertanian dan UKM
4.	Desa Margaluyu	Rintisan	Situ Cipanunjang, Situ Gayonggong, Situ Datar, Kebun Teh, Kebun Kopi, UMK (ikan kereamba), Wisata air, Seni Domba Depok.
5.	Desa Pasirmulya	Rintisan	Pertanian
6.	Desa Cilengkrang	Rintisan	Upacara kesenian benjang gulat dan helaran

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Terlihat dari tabel diatas terdapat 6 desa yang berstatus sebagai Desa Wisata di Kabupaten Bandung yang masih *blank spot* atau masih kurangnya akses internet didalamnya. Potensi yang dimiliki oleh keenam desa wisata tersebut akan mengalami hambatan pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan pengembangan desa wisata berkelanjutan karena belum adanya akses internet yang memadai didalamnya.

**Gambar 1.3**  
***Network Visualization***



Sumber: VOSviewer (diolah peneliti, 2025)

Pada visualisasi diatas yang merupakan hasil dari pencarian kata kunci “*tourism village*” dan “*public administration*” pada aplikasi VOSviewer oleh peneliti untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara Desa Wisata dengan Administrasi Publik. Maka, ditemukan hasil *network visualization* diatas, terdapat keterkaitan antara Desa Wisata dengan Administrasi Publik yang ditunjukkan pada garis *cluster* dan warna *cluster* yang saling berhubungan satu sama lain. Hal ini menjadi indikasi bahwa Desa Wisata masuk dalam kajian Administrasi Publik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Digitalisasi Terhadap Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Village*) di Desa Wisata Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah penelitian berdasarkan uraian latar belakang penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah digitalisasi berpengaruh terhadap pengembangan desa wisata berkelanjutan (*sustainable tourism village*) di Desa Wisata Alamendah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi terhadap pengembangan desa wisata berkelanjutan (*sustainable tourism village*) di Desa Wisata Alamendah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat dua manfaat dari hasil penelitian ini, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengetahuan baru mengenai pengembangan desa wisata yang berkaitan dengan digitalisasi baik bagi peneliti maupun pembaca serta dapat menjadi referensi pada penelitian sejenis khususnya di Bidang Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

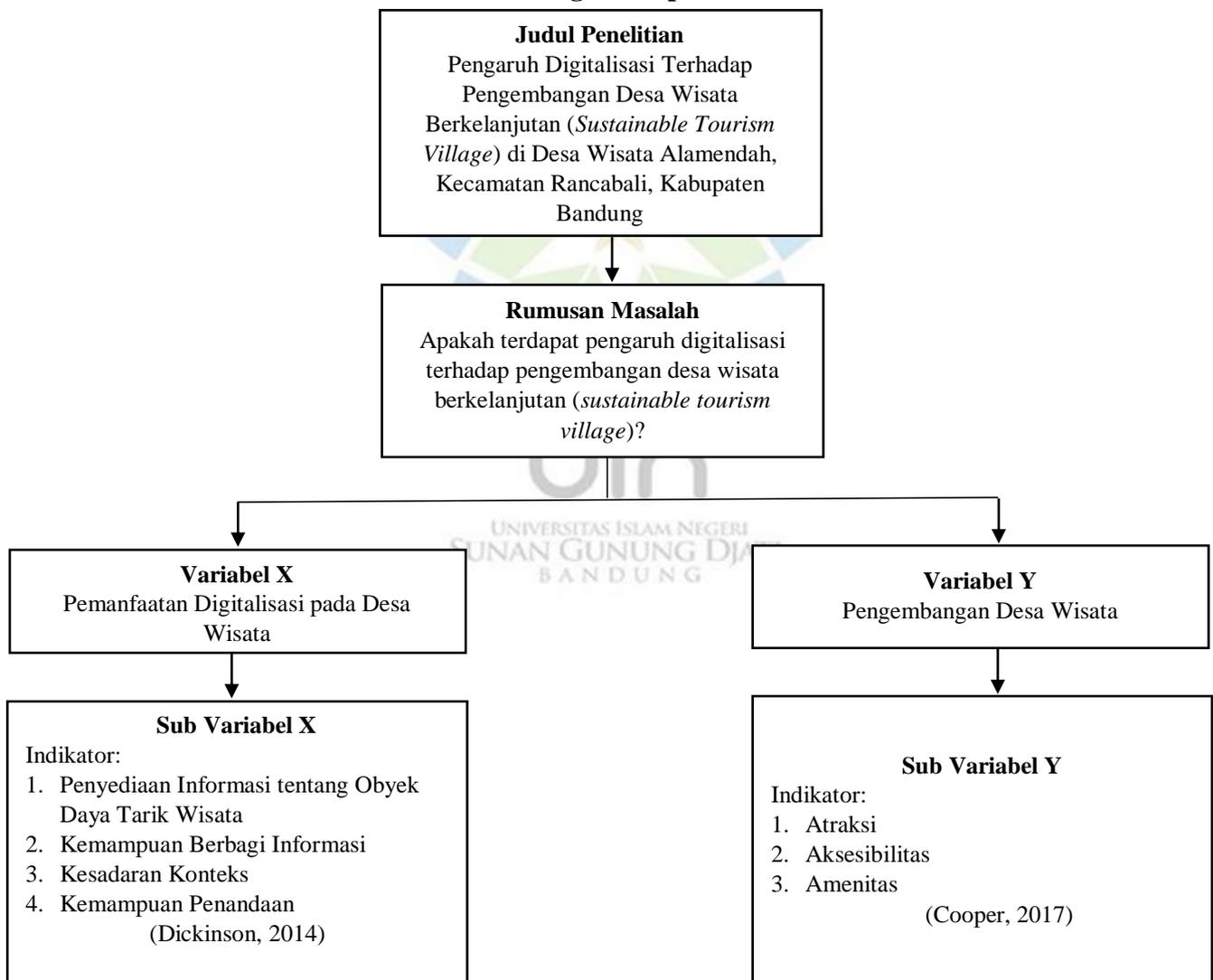
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Pemerintah Kabupaten Bandung terkhusus Pemerintah Desa Alamendah dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan desa wisata dengan memanfaatkan digitalisasi didalamnya supaya terciptanya Desa Wisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Village*).

### E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini membahas topik mengenai Pengaruh Digitalisasi Terhadap Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Village*). Untuk mengukur bahwa digitalisasi menjadi salah satu pengaruh pengembangan desa wisata berkelanjutan, maka harus terdapat indikator sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan terkait pengembangan desa wisata berkelanjutan.

**Gambar 1.4**

#### **Kerangka Berpikir**



(Kerangka Berpikir: Diolah Peneliti)

## F. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari suatu masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya dalam bentuk jawaban hasil penelitian. Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini maka dikemukakan jawaban sementara dalam penelitian ini yaitu:

H<sub>0</sub>: Digitalisasi tidak berpengaruh terhadap pengembangan desa wisata berkelanjutan (*sustainable tourism village*).

H<sub>1</sub>: Digitalisasi berpengaruh terhadap pengembangan desa wisata berkelanjutan (*sustainable tourism village*).





